

**STRATEGI BISNIS PT PERTAMINA DALAM MENGAMBIL ALIH HAK
EKSPLORASI MIGAS DARI PT TOTAL EXPLORATION
DI BLOK MAHAKAM TAHUN 2015**

Oleh:

Lassa Alam Bijaksana

Email: lassalamb@yahoo.com

Pembimbing: Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describes the strategy of Pertamina Company in take controll of fuel and oil exploration rights from Total Exploration and Production Company in Mahakam Bloc in 2015. Mahakam Bloc are one of most oil exploration in Indonesia especially in South Kalimantan. Since 1967 Indonesia Government gave the exploration right of Mahakam Bloc to Total Exploration & Production Company. Unit 2017 the exploration right was limited and Pertamina Company as a state corporate want to be a company that have a exploration right in Mahakam Bloc.

The writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the strategy of Pertamina Company in take controll of fuel and oil exploration rights from Total Exploration and Production Company in Mahakam Bloc. The theories applied in this research are neoliberalisme perspective with the international cooperation theory.

The conclution of this research are the strategy of Pertamina Company in take controll of fuel and oil exploration rights from Total Exploration and Production Company in Mahakam Bloc are done by Pertamina Company have done meeting with Indonesia Government in lobby of Mahakam Bloc exploration, Pertamina Company prepare a facility in take controlling exploration oil from Mahakam Bloc, Pertamina Company cooperation with Total E&P Company as a contractor oil Mahakam Bloc, Pertamina Company used IRRS in support Pertamina to oil exploration.

Key words: *strategy, oil, exploration, Mahakam.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah ekonomi politik internasional yang menganalisis tentang strategi bisnis dan langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Pertamina dalam mengambil alih eksplorasi migas dari PT Total E&P di Blok Mahakam tahun 2015. Energi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Energi dihasilkan dari beberapa elemen yang salah satunya adalah berasal dari minyak dan gas. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya alam yang potensial dibidang minyak dan gas. Blok Mahakam, merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia Timur.

Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Sejak tahun 1970 hingga tahun 2011, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan Blok Mahakam telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar US\$100 miliar. Sementara, cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga gas yang terus naik, potensi pendapatan

kotor Blok Mahakam sekitar US\$ 160 miliar atau sekitar Rp1.500 triliun.¹

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama,

¹ Pengelolaan Blok Mahakam.<http://www.hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2012

pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.²

Penulis menggunakan perspektif neo liberalisme, dimana dalam perspektif ini yang menjadi tujuan utama dari hubungan perdagangan adalah efisiensi untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi dan interaksi ekonomi yang dijalankan. Perspektif ini bermanfaat untuk memahami fenomena di setiap negara atau pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan daya saing nasional dan kekuatan ekonominya untuk mendapatkan keuntungan yang ditawarkan oleh pasar internasional atau global.³

Untuk membangun negara bangsa yang kuat untuk memerlukan pengintegrasian politik dan ekonomi sehingga negara harus melibatkan diri secara aktif untuk mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuasaan negara. Oleh sebab itu untuk mempertahankan perekonomiannya supaya tetap kuat maka harus melakukan hubungan ekonomi melalui surplus perdagangan dengan membatasi impor dan menggalakkan ekspor sebanyak-banyaknya. Hubungan dapat

disimpulkan bersifat *zero sum game* (konflik bukan bersifat harmonis). Menurut **Thomas Mun** dalam bukunya mengemukakan bahwa: “*The ordinary means therefore to encrease our wealth and treasure is by foreign trade, wherein we must ever observe this rule: to sell more to yearly than we consume of their in value...because that that part of the stock which is not returned to us in wares must necessarily brought home in treasure.*”⁴

Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia. Tiongkok dewasa ini telah berubah menjadi salah satu negara yang mempengaruhi perekonomian internasional. Hubungan ekspor Indonesia dan Tiongkok khususnya di bidang pertanian sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Namun dengan kekuatan ekonominya Tiongkok menjalin kerjasama untuk menghilangkan hambatan tarif dalam perdagangan dengan Indonesia. Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara-bangsa, dalam hubungan internasional negara sering kali yang menjadi pembuat keputusan yang

² Jemadu, Aleksius. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu

³ Aleksius jemadu. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu. Hal 225

⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm 18

tentunya tidak bertindak sendiri-sendiri namun berperan sebagai kelompok. Hubungan internasional berdasarkan analisa ini merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Peranan negara sangat penting dalam kerjasama antar negara satu dengan negara lain walaupun oknum yang bekerja dalam melakukan hubungan perdagangan atau terjadinya blok perdagangan adalah kelompok importir maupun eksportir.

Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (*interdependence*) antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting untuk peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia, selain itu hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi internasional antarnegara namun sebagian besar berhubungan dengan perdagangan internasional. Bidang ekonomi internasional seperti pertukaran jasa, komoditi, modal, teknologi informasi dan komunikasi.

Pertukaran jasa dan komoditi terjadi antara penduduk di satu negara dengan penduduk di negara lain karena adanya keperluan untuk memperoleh

jasa dan komoditi atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat dihasilkan sendiri. Pertukaran teknologi dan modal terjadi dalam rangka membantu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya untuk pengembangan industrinya. Teknologi yang dimiliki oleh suatu negara belum cukup canggih untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan modal yang dimiliki suatu negara tidak memadai.

Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.⁵ Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

1. *Defense Interest*: Kepentingan untuk melindungi negara atau rakyat dari ancaman fisik dari negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem suatu Negara.

⁵ Donald E. Nuchterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57

2. *Economic Interest:*
Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan negara lain akan memberikan keuntungan.
3. *World Order Interest:*
Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas Negara dengan aman.
4. *Ideological Interest:*
Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara yang berdaulat.⁶

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, strategi bisnis PT Pertamina dalam mengambil alih hak eksplorasi minyak dan gas di Blok Mahakam dari PT Total E&P adalah untuk mencapai kepentingan ekonomi Indonesia dibidang kedaulatan energi. Kepentingan ekonomi Indonesia menjadi salah satu alasan bagi PT

Pertamina Indonesia untuk dapat mengambil alih hak eksplorasi minyak dan gas di Blok Mahakam. Kemudian dalam penelitian juga dibutuhkan teori untuk menganalisis suatu kasus. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa fenomena itu terjadi.⁷ Dalam penelitian juga dibutuhkan pemaparan jelas tentang konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Berangkat dari uraian di atas, kerangka dasar teoritik yang akan dipergunakan dalam permasalahan ini adalah teori kerjasama internasional.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional, karena Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hal 219.

Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut⁸:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka

memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.

- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antarnegara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa: “Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.”⁹ Pada dasarnya kerjasama antar negara dilakukan oleh dua negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai kepentingan mereka. Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila

⁸ K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653

⁹ Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung*, 1977, hal. 19

ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

Kerjasama dapat diadakan dalam berbagai bentuk mulai dari kerangka kerjasama multilateral maupun kerjasama bilateral. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam hubungan internasional memiliki makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkuat kerjasama antara dua negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasionalnya. Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa ; “Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara”.¹⁰ Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan

saling mempengaruhi antara dua Negara.

Penggambaran tentang hubungan bilateral tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua negara dan tidak tergantung hanya pada negara yang dekat saja melainkan juga negara yang secara geografis letaknya agak jauh. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua negara.

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama. Dalam kerangka pemahaman Holsti

¹⁰Didi Krisna. 1993. *Kamus Politik Internasional*, Jakarta : Grasindo, hal. 18

dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini di sebut kerjasama.¹¹

Pendapat Holsti di atas memberikan batasan konsepsi yang jelas antara dua bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yaitu konflik dan kerjasama. Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama.

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan

nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional.¹²

Kerjasama internasional dapat terwujud atas dasar kepentingan yang sama dan bekerja atas prinsip saling menguntungkan. Pelaksanaan kerjasama ini didahului dengan tindakan-tindakan yang disalurkan melalui hubungan bilateral maupun multilateral. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama internasional perlu bagi setiap negara. Pada dasarnya tujuan suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak terdapat dalam negeri. Untuk itu negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama

¹¹*Op.cit.* Holsti, hal. 209

¹²T. May rudy. 2002. *Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, hlm.27

untuk mempertemukan kepentingan antar negara¹³.

Dalam melakukan kerjasama internasional, sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu:

1. Adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat, tanpa adanya penghargaan, tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula.
2. Adanya keputusan bersama dalam mengatasi persoalan yang timbul. untuk mencapai keputusan bersama diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan, bahkan komunikasi dan konsultasi lebih penting dibandingkan dengan komitmen yang biasanya hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Dengan kata lain frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari komitmen¹⁴.

Menurut J. Frankle, kerjasama merupakan identifikasi dari sasaran-sasaran bersama dan metode untuk

mencapainya, dengan kata lain kerjasama merupakan suatu hubungan yang teridentifikasi dari sasaran bersama dengan menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuan kerjasama tersebut.¹⁵ Dalam masa yang akan datang negara-negara akan bergantung pada kerjasama internasional yang sifatnya fungsional, yaitu kerjasama yang mencakup kehidupan internasional yang sangat luas dan untuk dapat memenuhi kebutuhan banyak umat manusia sampai yang terkecil. Kerjasama internasional merupakan hubungan antara dua atau lebih negara, perusahaan, lembaga yang melewati batas-batas negara¹⁶.

Investasi langsung sering kali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Pengertian penanaman modal langsung diatas pada pokoknya menekankan kepada pengertian modal asing yang dilakukan para penanam modal asing secara perorangan. Sornarajah merumuskan

¹³ Syamsur Dam, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal 15

¹⁴ *Ibid.* hal 16

¹⁵ J. Frankle, *Hubungan Internasional*, Jakarta, Singgih Bersaudara, 1980, hal 102 dalam Library UPNVJ, *Motivasi Singapura melakukan kerjasama Ekonomi Dengan Pemanfaatan Free Trade Area* di Pulau Batam, terdapat di <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/204613019/bab1.pdf> diakses pada 18 Februari 2013

¹⁶ *Ibid.*

investasi asing langsung sebagai berikut: “*Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of use in that country to generate. Wealth under the total or partial control of the owner of the asset.*”¹⁷ Dari pengertian yang dikemukakan Sornarajah diatas, maka investasi asing langsung mensyaratkan adanya transfer modal baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari satu negara ke negara lain dan tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Blok Mahakam merupakan salah satu area perusahaan migas yang ada di Kalimantan Timur dengan produksi gas sekitar 1.6 milyar kaki kubik dan kondensat 67 kilo barel setara minyak. Menurut data lifting periode produksi terbesar adalah masa 2008 hingga 2013 yang tercatat gas alam Indonesia sebesar 37,56 persen hingga 45,081 persen diantaranya berasal dari Kalimantan Timur. Pada periode yang sama, minyak bumi

nasional 15,92 -16,5 persen diantaranya juga dihasilkan dari bumi Kaltim.

Lapangan lain yang dikembangkan: Lapangan Tambora dan Lapangan Tunu pada tahun 1989 dan 1990. Produksi mencapai angka spektakuler ketika Lapangan Peciko masuk East Kalimantan Gas System tahun 1990, sekaligus menobatkan TEPI sebagai produsen gas terbesar di Indonesia Lapangan Sisi dan Lapangan Nubi mulai berproduksi tahun 2007. Tahun 2011, laju produksi gas dari blok tersebut sekitar 2,5 BSCFD dan 92,000 BOPD minyak dan kondensat (akan mengalami penurunan secara alaminah (*natural decline*) sampai level 1,60 BSCFD dan 67,000 BOPD saat ini.

Pada tahun 2017, diperkirakan akan mencapai level 1,05 BSCFD dan 29,000 BOPD dengan asumsi laju penurunan secara alamiah untuk gas sebesar 8% per tahun dan untuk minyak sebesar 15% per tahun. Kontribusi terbesar dari blok ini adalah Lapangan Bekapai, Handil, Tambora, Tunu, Peciko, Sisi dan Nubi. Total mulai masuk dalam *East Kalimantan Gas System* sejak Tahun 1982. Gas dari lapangan - lapangan tersebut dikirim ke LNG Bontang (Trains

¹⁷ Dalam Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internationa*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

A-H) dengan kapasitas 22.3 juta ton per tahun (million tonnes per annum/MTPA) dan konsumen lainnya seperti Kaltim Fertilizer Plant (KFP), Kaltim Methanol Indonesia (KMI) dan Kaltim Pasific Amonia (KPA).¹⁸

Saat ini, Blok Mahakam dikelola dan dioperasikan oleh Total *Exploration & Production Indonesia* asal Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 50%. Kegiatan di Blok Mahakam akan berumur 50 tahun pada 2017 nanti. Untuk mengambil alih blok tersebut, sejak Februari lalu, Pertamina telah menempatkan sejumlah pegawainya di Blok Mahakam untuk ikut terlibat pengoperasian. Total *Exploration & Production Indonesia* mendapatkan blok Mahakam melalui pelaksanaan penawaran wilayah kerja migas oleh Indonesia sebagaimana tertera di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 pasal 33. Dalam peraturan yang sama pada pasal 35, penawaran wilayah kerja dilaksanakan melalui lelang atau penawaran langsung

wilayah kerja.¹⁹ Wilayah yang ditawarkan oleh Indonesia kepada MNC atau dalam penelitian ini Total E&P belum tentu akan menghasilkan minyak atau tidak, karena blok yang Indonesia lelang atau tawarkan adalah blok kosong yang belum tentu ada minyak atau tidak.

Saat Total *Exploration & Production Indonesia* memenangkan lelang blok yang ditawarkan atau dilelang Indonesia, Total *Exploration & Production Indonesia* sudah wajib membayar *Award fee* atau biaya penghargaan kepada Indonesia kurang lebih sebesar 10.000.000 USD dan sudah langsung dikenai pajak. Di Indonesia pihak Total E&P disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja sama (KKS) dengan pemerintah Republik Indonesia (SKK Migas), merupakan Badan Usaha Tetap atau Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

¹⁸ Potensi Blok Mahakam Masih Rp 1.300 Triliun diakses di <http://www.jpnn.com/read/2014/05/22/235956/Potensi-Blok-Mahakam-Masih-Rp-1.300-Triliun> pada 2 Agustus 14.12 wib

¹⁹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.5 Tahun 2012 diakses diprokum.esdm.go.id/permen/2012/permen%20ESDM%2005%202012.pdf

Blok Mahakam dikelola perusahaan migas asal Perancis, Total E&P Indonesia, dengan kepemilikan hak partisipasi 50 persen dan sisanya dikuasai Inpex Corporation asal Jepang. Kontrak ini akan berakhir pada 2017 setelah berlangsung selama 50 tahun. Kontrak pertama kali ditandatangani pada 31 Maret 1967 dengan jangka waktu 30 tahun. Pada 31 Maret 1997, kontrak diperpanjang lagi selama 20 tahun dan akan berakhir 30 Maret 2017. Menjalang habisnya kontrak migas PT Total EP di Blok Mahakam, maka PT Pertamina mulai melakukan beberapa upaya untuk dapat mengambil alih hak eksplorasi migas di Blok Mahakam. Oleh karena itu, beberapa strategi bisnis yang dilakukan oleh PT Pertamina dalam mengambil alih hak eksplorasi minyak dan gas di Blok Mahakam, adalah sebagai berikut:

1. PT Pertamina Melakukan Pertemuan dengan Pemerintah Indonesia dalam rangka lobby Eksplorasi Blok Mahakam

Berdasarkan analisa SKK Migas terhadap pengelolaan migas di Blok Mahakam, maka PT Pertamina telah berulang-ulang menyatakan mampu mengelola blok Mahakam seperti dinyatakan oleh Dirut PHE Salis Aprilian, Direktur Ibrahim

Husein maupun Dirut Karen Agustiawan. Pernyataan tersebut disampaikan kepada Pemerintah Indonesia bahwa PT Pertamina menyatakan mampu menjadi operator Mahakam dengan menunjukkan bukti keberhasilan mengelola Blok ONWJ dan WMO. Operasi di Blok ONWJ justru lebih sulit dibanding operasi di Blok Mahakam. Dengan begitu, kami sangat yakin bahwa Pertamina mampu menjadi operator Mahakam. Seandainya pun Pertamina menyatakan tidak mampu, kami dan seluruh petitor pasti tetap akan meminta agar Pertamina ditunjuk sebagai operator, karena hal tersebut konstiusional, jauh lebih bermartabat, menjamin ketahanan energi dan mendukung kemandirian bangsa.²⁰

Terkait permasalahan keuangan dalam pengelolaan aset di Blok Mahakam, maka PT Pertamina memiliki *underlying asset* yang bisa menjamin kucuran kredit perbankan/lembaga keuangan. Apalagi jika hal ini didukung oleh jaminan pemerintah. Karena itu keuangan Pertamina yang terbatas bukan masalah, sepanjang pemerintah mendukung pemilikan cadangan

²⁰ Blok Mahakam Bagian I diakses di <http://migas-indonesia.com/2012/11/blok-mahakam-what-next-after-2017-bagian-1.html> pada 2 Agustus 2015 pukul 14.59 wib

nasional oleh Pertamina.²¹ Sebelum Maret 1997, KKS telah diperpanjang untuk masa kontrak 20 tahun, sehingga kontrak Blok Mahakam baru akan berakhir tanggal 31 Maret 2017. Sesuai Pasal 28 ayat 1 PP Nomor 35/2004, kontraktor dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan kontrak untuk masa waktu 20 tahun berikutnya.

2. PT Pertamina mempersiapkan Fasilitas dan Sarana dalam Mengambil Alih Eksplorasi Migas di Blok Mahakam

Dalam rangka persiapan untuk proses pengambilalihan hak eksplorasi migas di Blok Mahakam, maka sejak tahun 2015 PT Pertamina telah siap mengucurkan dana hingga US\$ 1 miliar atau sekitar Rp 9,4 triliun untuk mengebor 100 sumur baru di Blok Mahakam. Tidak hanya PT Pertamina yang berminat ingin mengambil alih Blok Mahakam. Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kertanegara (Kukar) dan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur pun sedang melakukan *participating interest* (PI) sebesar 10% di Blok Mahakam.

Pemkab Kutai Kartanegara sebetulnya mengharapkan

mendapatkan 75% dari PI 10% tersebut. Pemkab Kutai Kartanegara mengharapkan porsi PI lebih besar lantaran sebagian besar wilayah Blok Mahakam ada dalam teritori Kukar. PT Total E&P sendiri, selaku operator di Blok Mahakam berpendapat daerah merupakan bagian dari nasional sehingga meminta Pertamina yang membagi sahamnya 10 % kepada daerah dengan komposisi saham Pertamina 41 % sementara daerah 10 %. Sebaliknya, PT Pertamina bersikeras 10% saham untuk daerah tersebut merupakan pembagian saham antara Pertamina dan Total masing-masing 5% darisaham yang dimiliki.

3. PT Pertamina Bekerjasama dengan PT Total E&P sebagai Kontraktor Migas di Blok Mahakam

Sejak tahun 2016 Pemerintah Indonesia secara resmi menunjuk PT Pertamina sebagai Perusahaan Nasional yang sah untuk mengelola migas di Blok Mahakam. Akan tetapi sejak ditetapkan PT Pertamina tetap membawa PT Total E&P sebagai mitra dan kontraktor dalam pengelolaan migas di Blok Mahakam sampai 5 tahun kedepan. Pola interseksi antara Pertamina sebagai sokoguru utama dengan *Total E&P* dan BUMD Migas Kaltim sebagai penopangnya. Pola interaksi ini penting dan realistis

²¹ *Ibid.*

karena bagaimana pun Pertamina saat ini masih perlu penguatan kapasitas dari banyak aspek, seperti SDM, permodalan, dan teknologi dalam konteks *cost recovery*.²² Karena itu sangat logis jika dalam waktu tertentu Pertamina bisa “belajar” lebih banyak, bersinergi dengan *Total E&P* yang sudah memiliki pengalaman panjang, termasuk dan terutama dalam pengelolaan Blok Mahakam. Pelibatan BUMD Migas Kaltim juga menjadi sangat logis dengan melihat dinamika lokal, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi warga Kaltim yang menjadi lokus Blok Mahakam.

4. PT Pertamina bekerja sama dengan IRRS dalam Dukungan terhadap Pengelolaan Migas di Blok Mahakam

Selain melakukan *lobby* kepada Pemerintah untuk yakin dalam penyerahan Blok Migas di Blok Mahakam kepada PT Pertamina, maka PT Pertamina juga menjalin komunikasi dengan Serikat Pekerja di bidang Pertambangan dan bekerjasama dengan lembaga Indonesia Resources Studies (IRESS). Menurut Presiden Indonesia Resources Studies, Marwan menegaskan hingga kini pemerintah belum menetapkan

secara resmi status pengelolaan Blok Mahakam yang kontraknya berakhir pada 31 Maret 2017. Padahal sesuai permintaan pemerintah, PT Pertamina (Persero) telah menyampaikan proposal pengelolaan pada bulan Februari 2014, jika kelak ditugaskan mengelola Blok Mahakam sejak 1 April 2014. Ia mengatakan, pemerintah telah meminta kepada Pertamina memperbaiki proposal. Namun, paparnya, pemerintah tidak menjelaskan kapan waktu status kontrak Blok Mahakam akan ditetapkan.²³

Jika pemerintah konsisten terhadap amanat konstitusi menjaga kedaulatan negara serta mengutamakan ketahanan energi nasional dan kepentingan strategis nasional, maka penyerahan pengelolaan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina merupakan kebijakan yang bisa segera ditetapkan. Menurut Indonesia Resources Studies, memperhatikan lambatnya pengambilan keputusan, maka patut diduga bahwa oknum-oknum asing telah melakukan intervensi pada pemerintah sehingga keputusan ideal yang memihak rakyat tak kunjung

²² *Ibid.* Hlm 31

²³ Inilah Tuntutan Petisi Blok Mahakam untuk Pemerintah SBY dan DPR diakses di <http://www.iress.web.id/rabu-10-oktober-2012-115600-inilah-tuntutan-petisi-blok-mahakam-untuk-pemerintah-sby-dan-dpr.html> pada 2 Agustus 2015 pukul 21.52 wib

diambil. PT Pertamina di bawah pengawasan pemerintah dapat saja mengundang partisipasi asing, termasuk Total dan Inpex untuk memiliki saham di Blok Mahakam. Namun hal tersebut harus dilakukan secara *business to business* (btob) dan transparan sesuai kaedah yang berlaku secara global. Berikut ini Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004, Pasal 28 Ayat 9 dan 10, bahwa PT . Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk Wilayah Kerja yang habis jangka waktu kontraknya.²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan PT Pertamina dalam mengambil alih hak eksplorasi migas di Blok Mahakam dilakukan sesuai dengan undang-undang pengelolaan migas yang menyerahkan hasil pengelolaan migas kepada Pemerintah Indonesia melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Sejak tahun

1970 hingga tahun 2011, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan Blok Mahakam telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar US\$100 miliar. Sementara, cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga gas yang terus naik, potensi pendapatan kotor Blok Mahakam sekitar US\$ 160 miliar atau sekitar Rp1.500 triliun.

Blok Mahakam dioperasikan oleh Total E&P Indonesia (TEPI) dan terletak di wilayah provinsi Kalimantan Timur (Penemuan Blok Migas terbesar di Indonesia sejak tahun 1967). Minyak mulai diproduksi dari Lapangan Bekapai dan Lapangan Handil tahun 1974. Produksi puncak (*peak production*) sebesar 230,000 BOPD dicapai sekitar tahun 1977 bertepatan dengan start up LNG Bontang dan PT Total E&P memiliki masa kontrak migas selama 50 tahun sampai tahun 2017. PT Pertamina sebagai perusahaan BUMN menyatakan telah sanggup dan berkeinginan untuk mengambil alih hak eksplorasi migas Blok Mahakam dari PT Total E&P. Oleh karena itu, beberapa strategi yang dilakukan PT Pertamina dalam mengambil alih hak eksplorasi migas di Blok Mahakam dengan beberapa cara yaitu:

1. PT Pertamina Melakukan Pertemuan dengan Pemerintah

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Energi Nasional

Indonesia dalam rangka *lobby* Eksplorasi Blok Mahakam

2. PT Pertamina mempersiapkan Fasilitas dan Sarana dalam Mengambil Alih Eksplorasi Migas di Blok Mahakam
3. PT Pertamina Bekerjasama dengan PT Total E&P sebagai Kontraktor Migas di Blok Mahakam
4. PT Pertamina bekerja sama dengan IRRS dalam Dukungan terhadap Pengelolaan Migas di di Blok Mahakam

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aleksius jemadu. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Deliarnov, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Didi Krisna. 1993. *Kamus Politik Internasional*, Jakarta : Grasindo.
- Donald E. Nucterlain. 1979. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).
- K.J Holsti, 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis* , Jilid

II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.

Koesnadi Kartasasmita, 1977. *Administrasi Internasional, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi* Bandung.

Syamsur Dam, 1996. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

T. May rudy. 2002. *Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Energi Nasional

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.5 Tahun 2012

Website

Blok Mahakam Bagian I diakses di <http://migas-indonesia.com/2012/11/blok-mahakam-what-next-after-2017-bagian-1.html> pada 2 Agustus 2015 pukul 14.59 wib

Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internationa*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Inilah Tuntutan Petisi Blok Mahakam untuk Pemerintah SBY dan DPR diakses di <http://www.iress.web.id/rabu-10-oktober-2012-115600-inilah-tuntutan-petisi-blok-mahakam-untuk-pemerintah-sby-dan-dpr.html> pada 2 Agustus 2015 pukul 21.52 wib

J. Frankle, *Hubungan Internasional*, Jakarta, Singgih Bersaudara, 1980, hal 102 dalam Library UPNVJ, *Motivasi Singapura melakukan kerjasama Ekonomi Dengan Pemanfaatan Free Trade Area* di Pulau Batam, terdapat di <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/204613019/bab1.pdf> diakses pada 18 Februari 2013

Pengelolaan Blok Mahakam. <http://www.hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2012

diakses diprokum.esdm.go.id/permen/2012/permen%20ESDM%2005%202012.pdf

Potensi Blok Mahakam Masih Rp 1.300 Triliun diakses di <http://www.jpnn.com/read/2014/05/2/235956/Potensi-Blok-Mahakam-Masih-Rp-1.300-Triliun> pada 2 Agustus 14.12 wib